



KRISIS POLITIK MYANMAR: MASA DEPAN DEMOKRASI PASCA KUDETA MILITER

Muhamad Adian Firas^{1*}, Kiky Rizky¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Indonesia

*email: adian.firas@uinjkt.ac.id

Abstract

This article aims to explain the future of democracy in Myanmar after the military coup. The author uses the theory of reasons for military withdrawal from politics and the theory of democratic transition. The method used is a descriptive qualitative method with secondary data sources. This article finds that the continuation of democracy in this country will be difficult based on internal conditions. The military's solid support for the coup and the junta leader's tendency to extend martial law on the grounds of instability and weaken pro-democracy forces with a repressive approach shows that the military still wants to expand its powers as it did in the past. That opportunity exists precisely from outside the country, namely pressure and involvement from the international community, including Indonesia. Indonesia's position as chair of ASEAN is an opportunity for Indonesia to bring progress in resolving the political crisis in Myanmar.

Keywords: *democracy; democratic transition; military coup*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan masa depan demokrasi di Myanmar setelah kudeta militer. Penulis menggunakan teori alasan penarikan militer dari politik dan transisi demokrasi. Metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Artikel ini menemukan keberlanjutan demokrasi di negara ini akan sulit dilakukan berdasarkan kondisi internal. Militer yang solid dalam mendukung kudeta, kecenderungan pemimpin junta memperpanjang darurat militer dengan alasan instabilitas serta melemahkan kekuatan pro demokrasi dengan pendekatan represif memperlihatkan bahwa militer masih ingin memperluas kekuasaannya seperti yang dilakukannya di masa lalu. Peluang itu ada justru dari luar negara itu, yakni tekanan dan keterlibatan dunia internasional, termasuk Indonesia. Posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN menjadi peluang bagi Indonesia untuk membawa kemajuan dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar.

Kata Kunci: demokrasi; kudeta militer; transisi demokrasi

Pendahuluan

Pada 1 Februari 2021 lalu dunia dikejutkan dengan kudeta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan sipil. Harapan terhadap tumbuh dan berkembang demokrasi seiring dengan transisi menuju demokrasi yang bergulir sejak 2010 berubah menjadi pesimis dengan kembalinya militer sebagai penguasa politik seperti yang terjadi ketika Jenderal Ne Win berkuasa di tahun 1962.

Pandangan tersebut tidaklah salah, mengingat setelah melancarkan kudeta, militer kemudian melemahkan simbol kekuatan sipil dengan menangkap ikon demokrasi yang juga merupakan penasehat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) (Roza, 2021). Kudeta tersebut tentu saja direspon dengan aksi penolakan rakyat Myanmar. Ribuan orang baik itu aktivis, mahasiswa, tokoh agama beramai-ramai turun ke jalan berdemonstrasi menentang kudeta militer dan menuntut kekuasaan dikembalikan kepada sipil. Namun tuntutan itu dihadapi dengan tindakan represif aparat keamanan militer. Berdasarkan catatan *Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)*, suatu aliansi untuk pendampingan terhadap tahanan politik, dalam kurun waktu Februari hingga November 2022 lebih dari 2436 orang tewas akibat kekerasan militer Myanmar serta 16.191 orang ditahan (AAPP, 2022). Data ini kemungkinan terus bertambah mengingat tidak ada tanda-tanda junta militer akan menghentikan tindakan represif terhadap kelompok pro demokrasi.

Tentu kegagalan demokrasi disertai banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan junta militer menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional. Berbagai organisasi internasional seperti PBB hingga ASEAN mengutuk intervensi dan mengkhawatirkan krisis politik di Myanmar berlanjut ke persoalan krisis kemanusiaan. Mereka menyerukan masyarakat internasional merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan Myanmar. Uni Eropa dan Amerika bahkan makin gencar menambahkan sanksi baru terhadap Myanmar.

Watak represif junta militer rupanya tidak hilang meskipun transisi demokrasi dan era keterbukaan melanda Myanmar sejak 2010 lalu dengan dibukanya kran politik dan partisipasi masyarakat melalui pemilu dan membentuk pemerintahan sipil. Kudeta Militer 1 Februari 2021 seperti mengulang kudeta militer tahun 1990. Ketika itu Jenderal Saw Maung yang merupakan pemimpin junta militer tidak mengakui hasil

pemilu 27 Mei 1990 yang memenangkan NLD pimpinan Aung San Suu Kyi . Junta malah mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan tahanan rumah kepada Aung San Suu Kyi dan menahan para pendukungnya. Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat juga diberantas dengan cara represif. Sikap keras kepala junta militer dan penolakannya terhadap protes masyarakat internasional berhasil menghancurkan demokrasi yang sebenarnya sedang tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya ahli masalah Myanmar Steinberg menempatkan Myanmar sebagai “*the most monolithically military control in the world*” (Neher, 1995).

Berdasarkan fakta historis tersebut artikel ini bertujuan untuk mengkaji prospek demokrasi di Myanmar pasca kudeta militer. Apakah junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing akan melanjutkan transisi menuju demokrasi atau justru menghentikan transisi dan mengembalikan sistem demokrasi ke sistem politik otoriter dan membawa kembali Myanmar dalam masa kegelapan seperti ketika Jenderal Newin, Jenderal Saw Maung, hingga Jenderal Than Shwe berkuasa yang melakukan penetrasi dan kontrol yang kuat terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Myanmar dan mengunci kebebasan politik Rakyat Myanmar.

Tinjauan Teoritis

Pertanyaan besar dalam mencermati krisis politik Myanmar pasca kudeta adalah apakah junta militer akan mengembalikan kekuasaan melalui transisi politik melalui pemilu pada Agustus 2023 seperti yang pernah dijanjikan Jenderal Min Aung Hlaing atau justru melanjutkan kekuasaan dan menempatkan Myanmar dalam kontrol militer seperti yang dilakukan senior-seniornya terdahulu. Kerangka berpikir yang disampaikan oleh Sundhaussen (1995) bisa digunakan untuk menjawab itu. Menurut Sundhaussen, ada tiga alasan yang membuat militer rela menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Pertama, alasan internal militer. Transisi kekuasaan itu bisa terjadi apabila pimpinan militer percaya bahwa tatanan demokrasi adalah yang terbaik dan mereka secara sukarela memberikan kesempatan kepada sipil untuk memerintah. Kedua, alasan eksternal. Ada kekuatan oposisi yang kuat dari luar militer, seperti protes menentang keberlangsungan rezim yang dilakukan kelompok masyarakat. Ketiga, alasan eksternal, rezim militer yang memiliki ketergantungan ekonomi, militer, maupun logistik dengan negara lain

akan terancam apabila negara yang selama ini mendukungnya mengancam menarik diri atau menghentikan bantuannya (Sundhaussen, 1995).

Kudeta militer Februari tahun lalu berikut rangkaian kekerasan yang dilakukan junta terhadap masyarakat sipil makin mengukuhkan negeri ini dengan catatan-catatan pelanggaran HAM-nya. Keadaan ini tentu bertentangan dengan pandangan O'Donnell & Schmitter (1993) yang menghendaki hadirnya rezim yang mendukung liberalisasi yang ditandai dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dan sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan negara dan aparatnya. Transisi seharusnya memberikan ruang kebebasan politik dan pluralisme politik sehingga masyarakat mendapatkan akses politik yang luas dalam kehidupan bernegara. Pluralisme politik dimaknai sebagai *diversification of power* dimana kekuasaan politik menyebar ke berbagai kekuatan atau kelompok kepentingan dalam masyarakat. Ia tidak terpusat atau menjadi monopoli kekuatan politik tertentu (Nugroho, 2001).

Kudeta militer seperti yang dikhawatirkan Huntington, dapat menjadi titik balik dari transisi menuju demokrasi karena berpotensi menggeser sistem politik demokratis menjadi sistem politik otoriter. Menurut Huntington, sejumlah besar transisi dari rezim demokratis mengambil bentuk kudeta militer di mana para perwira militer (biasanya pimpinan puncak angkatan bersenjata) menyingkirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis dan mendirikan suatu bentuk kediktatoran militer (Huntington, 2001).

Dalam kasus Myanmar, krisis politik yang terjadi menjadi momen kritis terhadap masa depan demokrasi. Tidak ada jaminan bahwa transisi yang dijanjikan akan betul-betul terjadi dan menghasilkan rezim demokratis. Pergolakan sosial dan menguatnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan junta telah mengancam kohesi sosial masyarakat. Pada titik itulah sikap politik otoriter akan cenderung berlanjut dan mendorong kekuatan lama pro militer bangkit kembali melanjutkan sejarah panjang kekuasaan militer dalam politik di negeri itu. Melihat situasi politik di Myanmar saat ini harus dengan pemahaman bahwa transisi demokrasi yang dimulai pada 2010 tidak berlandaskan pada kebangkitan *civil society* yang mampu memaksa rezim militer mundur dari politik. Transisi politik tidak juga karena kesadaran yang tulus dari rezim militer untuk melakukan reformasi politik secara serius. Itulah sebabnya banyak pihak yang ketika itu skeptis terhadap demokratisasi di Myanmar, apalagi reformasi politik

tersebut tidak diikuti oleh reformasi militer menjadi militer profesional. Militer Myanmar tetap mengambil posisi sebagai kekuatan politik penting dan membayangi kekuatan sipil yang telah terbentuk. Menurut Renshaw, militer hanya akan melihat transisi itu berhasil apabila partai oposisi NLD berikut pemimpinnya Aung San Suu Kyi bersikap kooperatif dengan militer, otonomi dan peran politik militer dalam kehidupan bernegara terjamin, tidak ada penuntutan terhadap kejahatan perwira militer ketika berkuasa, dan perdamaian dengan kelompok minoritas yang berkonflik dengan pemerintah (2019). Artinya militer bersikap *wait and see* dalam proses transisi untuk memastikan kepentingan-kepentingannya tidak terancam dalam proses transisi itu. Dan untuk memastikan itu militer tidak sungguh-sungguh menarik diri dari panggung politik. Sikap itu secara tegas disampaikan Jenderal Senior Ming Aung Hlaing dalam parade militer Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata pada 2016 yang secara tegas mengingatkan rakyat Myanmar bahwa peran politik militer sangat penting bagi stabilitas dan kesejahteraan negara (Renshaw, 2019).

Kudeta Februari 2021 membuktikan bahwa junta militer tidak pro demokrasi, bahkan melakukan kegagalan demokrasi seperti yang pernah dilakukan pendahulunya Jenderal Ne Win di tahun 1962, Jenderal Saw Maung dan Jenderal Than Shwe di era 1990-an. Kekhawatiran itu sangat beralasan mengingat kontrol militer sangat kuat disertai pembatasan kebebasan politik rakyat dan keengganan militer untuk mempercepat transisi kekuasaan. Militer justru memperpanjang kekuasaan dengan menarik ulur waktu pemilu yang hingga kini belum ada kepastian menyusul tindakan Jenderal Min Aung Hlaing yang memperpanjang keadaan darurat hingga enam bulan ke depan dan menyatakan bahwa pemilihan umum hanya dapat dilakukan bila keadaan negeri itu stabil dan damai (Hutapea, 2022). Demikian juga transisi tidak memberikan akses politik bagi berbagai kelompok, kekuatan politik dalam masyarakat untuk terlibat. Junta malah memberangus kehidupan politik sehingga mengharapkan tekanan dari oposisi tampaknya sulit untuk diwujudkan mengingat pasca melancarkan kudeta, junta secara sistematis melakukan pelemahan terhadap kelompok oposisi dengan menangkap, menghukum, dan melakukan tindakan represif terhadap upaya perlawanan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Penelitian deksriptif adalah penelitian untuk menggambarkan secara tepat (apa adanya) sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (Bakri, 2002). Lebih lanjut Arikunto mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan (Arikunto, 1989).

Penulisan dalam artikel ini kemudian mengembangkan kerangka eksplanatif untuk menjelaskan hal-hal dibalik fenomena sosial dengan memberikan penjelasan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Rumusan eksploratif digunakan untuk menjelaskan kasus Krisis Politik Myanmar khususnya terkait dengan kudeta militer dan dampaknya terhadap demokrasi di negara itu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka atau *library research*. Dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, *report*, dan internet.

Jalan Terjal Demokrasi di Myanmar

Myanmar adalah sebuah contoh negara dimana kekuasaan militernya sangat kokoh dan mencengkram bangsa itu selama puluhan tahun. Bukan berarti gerakan-gerakan pro demokrasi tidak ada, akan tetapi intervensi/kudeta yang kerap kali dilakukan oleh junta militer selalu menggagalkan proses demokrasi itu. Termasuk optimisme akan perubahan seiring dihadirkan kembali demokrasi di negara itu yang ditandai dengan diadakannya pemilu 2010 dan makin terbukanya Myanmar dengan dunia luar pupus kembali ketika Junta Militer kembali melakukan kudeta militer pada 2021 lalu.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa hadirnya Militer dalam politik dimulai sejak 1958. Ketika itu militer memang diundang masuk oleh pemerintahan sipil PM U Nu. Dasarnya adalah adanya surat perintah dari PM U Nu kepada Jenderal Ne Win untuk menyelamatkan negara dari kekacauan politik dan ancaman disintegrasi yang melanda negara itu (Wahono, 2005). Militer juga mendapatkan tugas untuk mempersiapkan pemilihan umum di tahun 1960. Dalam waktu dua tahun kemudian militer berhasil

mengatasi dan menstabilkan negara dan kembali mengembalikan mandat kekuasaan kepada pemerintahan sipil hasil pemilu. U Nu dan partainya *Union Party* kembali memimpin .

Syahwat politik militer muncul kembali ketika mereka melihat situasi politik yang kembali tidak stabil sebagai akibat pemberontakan yang dilakukan etnis minoritas Karen, Shin, dan lain-lain yang khawatir nasib mereka dan menuntut pemberlakuan federal murni. Jenderal Ne Win memanfaatkan dengan baik keuntungan politik saat itu dengan melakukan pengambilalihan kekuasaan pada 1 Maret 1962 dari pemerintahan sipil, membatalkan konstitusi, dan selanjutnya membentuk dewan revolusi yang beranggotakan para petinggi militer. Sejak itulah militer mulai mengontrol kehidupan sosial politik rakyat Myanmar dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang sebenarnya telah diterapkan sejak negeri ini merdeka. Dalam kurun waktu 1962-1988 Jenderal Ne Win memerintah dengan hanya mengakui satu partai politik buatan pemerintah yaitu Burma Socialist Program Party (BSPP).

Militer kembali melakukan penggalan demokrasi pada 1990 ketika Jenderal Than Shwe tidak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partai politiknya *national league for democracy* (nld) lalu melanjutkan kekuasaannya. Sebenarnya pada tahun-tahun akhir 1980-an muncul gerakan-gerakan pro demokrasi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan militer pimpinan militer Jenderal Ne Win. Kembalinya Aung San Suu Kyi, putri *founding father* negara itu Jenderal Aung San, dari Inggris makin memotivasi gerakan tersebut berdemonstrasi dengan menjadikan Aun San Suu Kyi sebagai simbol kekuatan demokrasi. Junta militer sempat bersikeras menekan gerakan tersebut dengan melakukan aksi represif yang terkenal dengan tragedi 8888 yang menewaskan kurang lebih 3000 demonstran, namun tidak mengendorkan semangat rakyat untuk terus memperjuangkan demokrasi. Akhirnya Jenderal Ne Win mundur dari kekuasaan dan menyerahkannya kepada juniornya. Jenderal Than Shwe kemudian menjanjikan transisi politik melalui pemilu 1990. Sayangnya harapan rakyat Myanmar akan hadirnya demokrasi di negara itu hilang setelah Jenderal Than Shwe menganulir hasil pemilu 1990 dan melalui *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) yang dibentuknya melanjutkan pemerintahan militer di negeri itu.

Seperti halnya pendahulunya, Jenderal Than Shwe melanjutkan watak otoriter dan menggunakan cara represif dalam membungkam protes terhadap pemerintahannya.

Tidak sampai setahun sejak Than Shwe membatalkan pemilu, pasukan militer berhasil melemahkan dan membungkam kekuatan oposisi baik di perkotaan maupun kelompok etnis minoritas di pedesaan. Junta bahkan menangkap dan memenjarakan ribuan orang, yang terdiri dari tokoh oposisi dan mahasiswa yang menentang rezim. Bahkan tokoh dan ikon demokrasi Myanmar yang juga pemenang pemilu 1990, Aung San Suu Kyi, selama belasan tahun kemudian dikenai tahanan rumah. Praktis aksi-aksi represif yang dilakukan junta membuat kekuatan sipil makin tidak berdaya dan secara sistematis mampu melemahkan posisi sipil dalam perpolitikan Myanmar. Semangat demokrasi yang sedang tumbuh di negara itu kemudian tumbang dan dimatikan oleh junta militer. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga menjadi hal yang biasa di Myanmar. lembaga kemanusiaan yang bermarkas di Inggris, TBBC, misalnya pada Oktober 2007 melaporkan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh junta militer menyebabkan sekitar 503,000 orang terpaksa atau dengan kehendak sendiri harus mengungsi dari kampung halaman mereka (TBBC, 2007).

Akhirnya setelah dua puluh tahun membelenggu kebebasan dan partisipasi politik rakyatnya, Junta Militer kembali menggelar pemilu pada November 2010. Pemilu ini direspon positif dan negatif dari berbagai pihak. Pihak yang pesimis menilai pemilu tersebut hanya sekedar sandiwara politik junta militer karena sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa partai politik bentukannya akan memenangkan pemilu karena pada saat yang sama mereka juga telah melemahkan kekuatan politik riil dalam masyarakat. Selain itu pemilu ini dianggap pencitraan junta untuk mendapatkan perhatian dunia internasional dengan harapan sanksi-sanksi akan dihentikan. Sementara pihak yang optimis melihat peristiwa tersebut sebagai babak baru dari transisi politik yang pelan-pelan sedang berlangsung. Seperti diperkirakan banyak orang, partai politik bentukan pemerintah, Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), memenangi dan mendominasi dengan 80% suara. Pihak yang pesimis, misalnya Komisi HAM PBB pun buka suara dan menyatakan bahwa pemilu tersebut bukanlah pemilu yang bebas dan adil karena pembatasan yang sangat ketat terhadap partai oposan pemerintah dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembicaraan politik dengan tokoh-tokoh oposisi (Lighton, 2010). Sedangkan pihak yang optimis memandang pemilu ini membuka jalan bagi demokrasi di negeri itu. Bahkan tokoh oposisi, Aung San Suu Kyi yang sempat menyeru kepada para pendukungnya untuk memboikot hasil pemilu pada

akhirnya mengubah pandangannya dan menilai bahwa bekerjasama dengan militer merupakan langkah terbaik dalam mewujudkan demokrasi di Myanmar. Apalagi pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dengan melepaskan ribuan tahanan politik dan melakukan gencatan senjata dengan kelompok etnis minoritas. Suu Kyi juga menilai bahwa Presiden Thein Sein adalah jenderal militer yang jujur dan baik yang akan sungguh-sungguh melaksanakan reformasi .

Tanda-tanda perubahan itu pada awalnya memang terlihat. Selain seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah Myanmar juga makin membuka kran kebebasan politik bagi rakyatnya, membuka diri dari pergaulan internasional yang ditunjukkan dengan Myanmar untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ASEAN Games, menjalankan *look west policy* (Tun, 2013) dengan negara Barat agar sanksi-sanksi yang dihentikan dan berbalik menjadi bantuan, konsistensi penyelenggaraan pemilu sela dan pemilu lima tahunan pada tahun-tahun berikutnya hingga dipilihnya Aung San Suu Kyi sebagai *counsellor of the state*. Walaupun pada saat yang sama sorotan internasional terhadap negeri ini begitu keras ketika cara-cara kekerasan dilakukan militer dalam merespon konflik Rohingya sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan dan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat militer. Sikap diam Aun San Syi bisa dibaca sebagai ketidakmampuannya dalam mengendalikan militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing dan secara politik menegaskan bahwa kekuatan militer masih kokoh dan tidak tersentuh reformasi politik.

Kudeta Militer Februari 2021: Jebakan Politik Otoritarianisme Junta?

Harapan akan terjadinya transisi politik yang mulus di negeri itu buyar ketika secara mengejutkan pimpinan militer Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintah sipil pada 1 Februari 2021 lalu. Alasan kudeta militer ini adalah karena berbagai kecurangan pemilu 2020. Jenderal Min Aung Hlaing kemudian segera meyakinkan rakyat Myanmar bahwa ia akan mempersiapkan pemilu ulang yang lebih demokratis. Bila dicermati secara mendalam, kudeta ini dapat diduga sebagai reaksi militer terhadap kalahnya partai politik bentukannya. Seperti diketahui, *National League for Democratic* (NLD) merebut 396 dari 476 kursi parlemen atau 83%. Dominasi partai Aung San Suu Kyi ini tentu memberikan peluang terjadinya perubahan-perubahan signifikan dalam konstitusi

Myanmar yang memungkinkan posisi militer makin lemah dalam sistem politik Myanmar (Yasa, 2022).

Pengambilalihan kekuasaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembatasan kebebasan politik masyarakat melalui pemberlakuan keadaan darurat, kebijakan jam malam, pemutusan jaringan internet dan pengerahan aparat militer dan kendaraan tempur untuk melawan aksi demo rakyat menentang kudeta. Hal yang mengejutkan adalah ketika junta militer menurunkan *light infantry division* ke-77 dalam menghalau para demonstran. Pasukan inilah yang dianggap paling bertanggungjawab dalam pembantaian etnis Rohingya tahun 2017 lalu (Yasa, 2022). Tentu diturunkannya pasukan ini bukan tanpa alasan. Setidaknya dengan reputasinya junta berharap demonstran akan gentar dengan sinyal bahwa junta militer tidak segan melakukan cara kekerasan untuk membungkam aksi -aksi demo. Hal itu dibuktikan hanya dalam kurun waktu empat bulan sejak kudeta saja tercatat 842 orang tewas (CNN Indonesia, 2021). Jumlah ini terus bertambah seiring intensnya kekerasan yang dilakukan junta militer.

Pola yang dilakukan junta militer dalam kudeta tersebut sama dengan pengambilalihan kekuasaan dari tangan sipil pada tahun 1990 silam. Pada saat itu junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe menganulir kemenangan NLD. Keyakinan militer bahwa partai bentukan mereka *National Unity Party* (NUP) dapat memenangkan simpati rakyat terbantahkan dengan kemenangan mutlak NLD yang meraih 90% kursi parlemen. Alasan kecurangan pemilu dijadikan pembenaran bagi junta militer untuk membatalkan hasil pemilu, melanjutkan kekuasaan, dan menghentikan transisi politik. Untuk memperkuat kekuasaan mereka membentuk *State Peace and Development Country* (SPDC) yang terlihat lebih *soft* namun ternyata tidak jauh berbeda dengan SLORC yang tetap represif dalam mengontrol kehidupan politik rakyat Myanmar.

Turnell, dalam artikelnya yang berjudul “*Myanmar’s Fifty Years Authoritarian Trap*” menjelaskan bahwa keberhasilan rezim militer dalam mempertahankan kontrol politiknya terhadap rakyatnya adalah karena kemampuannya dalam mengeksploitasi cara represif dan isu nasionalisme, persatuan bangsa, dan ancaman disintegrasi sebagai basis legitimasinya berada dalam pusat kekuasaan (Turnell, 2011). Berangkat dari pemikiran Turnell diatas ada kekhawatiran junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing sedang berupaya membawa kembali Myanmar ke dalam sistem *authoritarian* yang hampir 50 tahun hidup di negeri itu. Perlawanan kelompok etnis minoritas yang

tadinya mengendur seiring konsolidasi elit dalam proses transisi politik kembali menguat setelah militer melakukan kudeta. Menurut laporan, kudeta militer telah menyatukan etnis minoritas bersama-sama dengan kelompok demokrasi untuk melawan junta militer. Saw Kapi, direktur lembaga *think tank* Myanmar, *Salween Institute for Public Policy*, membenarkan laporan tersebut dan mengatakan bahwa para demonstran dan etnis minoritas saat ini bersatu dalam menentang militer, Kelompok minoritas itu setidaknya ada 21 organisasi kelompok paramiliter etnis Myanmar seperti Serikat Nasional Karen (KNU), Tentara Negara Bagian Wa Bersatu yang berkekuatan 30.000 orang, dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) (Rebbighausen, 2021). Bisa jadi dalam keadaan normal antar kelompok etnis tersebut saling bermusuhan karena saling bersaing berbeda pendapat tentang masa depan Myanmar. Namun sekarang kudeta telah menyatukan mereka. Saat ini berlaku prinsip “musuh dari musuhku adalah temanku” karena mereka sama-sama menolak kekuasaan militer.

Seperti yang diceritakan Dr. Sasa, juru bicara NUG, junta militer mengerahkan helikopter tempur dan senjata artileri untuk menumpas pemberontakan anti-junta di kawasan Timur. Operasi militer di negara bagian Kayah itu memaksa ribuan penduduk mengungsi dari kediaman masing-masing. Warga di kawasan perbatasan Thailand itu mengklaim militer menembakkan senjata artileri dari ibu kota Loikaw ke arah Demoso, yang berjarak sekitar 15 km. Kota itu dikabarkan saat ini diduduki Pasukan Pertahanan Rakyat. Medan pertempuran di Kayah adalah satu dari sekian banyak front yang dihadapi junta militer. Sejak Kudeta 1 Februari 2021, pasukan pemerintah tidak lagi menghadapi sekedar pemberontakan etnis minoritas, melainkan aliansi antara pemerintahan sipil bayangan Myanmar dan pemberontak. Ketika kekerasan menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan krisis politik maka rakyat Myanmar tidak punya pilihan selain angkat senjata melawan junta militer (Dw.com, 2022).

Bersatunya kekuatan pro demokrasi dan kelompok etnis minoritas melawan kekuasaan junta militer membuat kekacauan dan instabilitas politik di Myanmar belum teratasi. Di sinilah kekhawatiran itu muncul. Sulit membayangkan apabila junta tidak memiliki kalkulasi politik bahwa akibat tindakannya melakukan kudeta akan mendorong perlawanan rakyat dan memicu kekacauan dimana-mana. Atau ini memang skenario politik yang diinginkan pemerintah untuk memperpanjang kekuasaannya dan menghidupkan kembali otoritarianisme. Pandangan ini beralasan mengingat pada 1

Agustus 2022 lalu pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan untuk memperpanjang masa darurat enam bulan lagi dan menegaskan bahwa pemilu akan dilaksanakan apabila kondisi negara dalam keadaan stabil dan damai. Jenderal Min Aung kemudian menyampaikan bahwa Dewan Pertahanan dan Keamanan Militer telah menyetujui secara bulat usulannya tersebut (Hutapea, 2022). Pengumuman tersebut jelas membawa ketidakpastian politik kapan pemilu yang dijanjikan akan berlangsung. Ketidakstabilan politik menjadi alasan junta militer memperpanjang kekuasaannya. Sementara pergolakan etnis minoritas di Myanmar secara historis telah ada sejak negara itu merdeka hingga kini dan menjadi persoalan besar bagi negara tersebut. Saat kondisi normal saja dan pemerintahan berada ditangan sipil Myanmar tidak mampu menyelesaikan konflik horizontal di Rakhine pada 2017 lalu yang menyesak hati nurani karena maraknya kekerasan terhadap etnis Rohingya sehingga peristiwa tersebut menjadi sorotan dunia internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan bahkan disinyalir telah terjadi genosida terhadap etnis Rohingya tersebut. Demikianlah meningkatkan kekerasan dan pemberontakan sebagai akibat penolakan kudeta militer dan perlawanan terhadap metode represif yang digunakan junta justru menjadi pintu masuk bagi junta untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan selama puluhan tahun oleh junta militer pendahulunya.

Masa Depan Demokrasi

Ketidakpastian transisi politik seperti yang dijelaskan di atas menempatkan bangsa Myanmar dalam bayang-bayang kebangkitan kembali otoritarianisme. Metode kekerasan yang digunakan junta militer bukan saja berdampak pada pelemahan kekuatan pro demokrasi, namun juga memperkuat reputasi pelanggaran HAM junta militer terhadap rakyatnya. Intimidasi politik yang sangat serius dilakukan junta militer dengan mengeksekusi mati empat tahanan politik pada juli 2022. *Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP) melaporkan bahwa pada Senin 25 Juli 2022 pemerintah mengumumkan telah mengeksekusi hukuman mati empat tahanan politik. Keempat tahanan politik itu adalah Kyau Min Yu, Phyo Zayar Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw (AAPP, 2022). Satu dari keempat tahanan politik yang dieksekusi mati itu adalah mantan anggota parlemen dari Partai NLD, yaitu Phyo Zayar Thaw, dituduh

melanggar UU Terorisme. Kyau Min Yu atau yang akrab dipanggil Jimmy adalah aktivis politik. Sedangkan dua lainnya dieksekusi atas tuduhan membunuh perempuan yang mereka duga sebagai informan junta militer. Masih menurut laporan AAPP keempat tahanan politik itu dieksekusi tanpa melalui proses yang adil dan diduga telah mengalami siksaan selama masa penahanan.

Eksekusi hukuman mati terhadap tahanan politik itu tidak akan berhenti di sini. Karena puluhan tahanan politik lain lainnya terancam menghadapi hukuman mati. Menurut informasi Yuyun Wahyuningrum, wakil Indonesia pada Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (AICHR), ada 41 lagi tahanan politik yang siap dieksekusi dalam beberapa waktu mendatang. Selain itu tambahan informasi dari AAPP bahwa kemungkinan ada 74 orang yang terdiri dari mahasiswa, profesional, beberapa diantaranya adalah perempuan akan menghadapi pembunuhan di luar proses sidang (Pramudyani, 2022). Bisa dipastikan bahwa akibat tindakannya itu Myanmar mendapat kritik tajam dan kecaman dari dunia internasional. PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mengutuk hukuman mati tersebut (Aziza, 2022). Sayangnya kecaman dunia internasional itu diabaikan oleh junta militer dan melihat bahwa kritik internasional sebagai intervensi urusan domestik Myanmar.

Belum hilang kekhawatiran dunia internasional akan eksekusi mati terhadap tahanan politik yang kemungkinan akan terus berlanjut, junta militer melanjutkan teror politiknya dengan menurunkan jet tempurnya untuk menyerang negara bagian Kachin yang didiami oleh etnis minoritas. Yang mengejutkan serangan itu dilakukan di tengah konser musik yang sedang berlangsung dalam rangka peringatan 62 tahun berdirinya Kachin Independence Organisation (KIA). Kelompok etnis minoritas ini memang sejak awal Myanmar merdeka gencar melakukan gerakan separatis di wilayah utara negara itu. Tidak kurang dari 80 orang dilaporkan tewas dalam serangan jet tempur tersebut (Mutiasari, 2022).

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan keseriusan junta militer meneror dan mengintimidasi siapa dan kelompok mana saja yang melawan rejim, Mereka tidak peduli dengan pelanggaran HAM seolah hal yang biasa. Kecaman, kutukan, bahkan sanksi internasional tidak mereka hiraukan seakan mereka ingin menunjukkan bahwa berpuluh-puluh tahun lamanya mereka mampu melewati berbagai sanksi dan tekanan

internasional. Fakta-fakta tersebut menuntun kita pada pertanyaan bagaimana prospek demokrasi di negara yang berjuluk seribu pagoda tersebut?

Dengan menggunakan perangkat analisis yang digunakan Sundhaussen pada awal artikel ini dapat dijelaskan bahwa dari aspek internal junta militer saat ini berada pada ruang yang memungkinkan dirinya untuk melanjutkan kekuasaan. Internal militer sangat solid. Sejak militer berkuasa baik itu pada era Jenderal Ne Win, Jenderal Saw Maung, maupun Jenderal Than Shwe militer solid dan tidak pernah terdengar adanya perpecahan dalam tubuh militer. Demikian juga saat ini, pimpinan junta, Jenderal senior Min Aung Hlaing sangat kuat ketokohnya. Hal itu dibuktikan dengan tidak ada penolakan akan usulan perpanjangan keadaan darurat berikut perpanjangan kedudukannya sebagai pemimpin. Bahkan persetujuan itu diraihinya dengan suara bulat. Hal ini bisa terjadi karena relasi *patron client* yang terbentuk sejak lama dan menjadikan figur jenderal senior sebagai sosok yang dominan Steinberg kemudian menjelaskan hubungan tersebut sebagai berikut:

“Instead, what has been constructed in Myanmar is a vast apparatus of patron-client relationships based on personalized rule in which senior military leaders dominate. This system has permeated society and subsumed the country's formal laws and institutions. This apparatus is not a development state found in other parts of Asia—authoritarian, yet concerned with the production of public goods, improving productivity, lifting human capital and stimulating investment, in addition to maintaining power—but is instead a patrimonial state concerned more with the distribution of private benefits within the power hier’ (Turnell, 2011)

Jadi sebagaimana lazimnya dalam hubungan *patron client*, sang *patron* akan melindungi dan memenuhi kebutuhan *clientnya*. Sebagai imbalannya sang *client* memberikan loyalitas dan dukungannya kepada sang *patron*. Kontrol politik selama berpuluh-puluh tahun menyebabkan junta militer mendominasi segala aspek kehidupan di Myanmar. Mereka menguasai segala sumber daya yang di negara itu dan hal ini dieksploitasi dengan baik untuk menopang kekuasaannya dan tentu saja memberikan benefit bagi anggotanya. Steinberg bahkan menyebut kelompok militer ini seperti negara dalam negara:

“the military came to be a "state within a state," an insular community of up to 400,000 men in uniform—the second largest in Southeast Asia—and 2 million dependents, or about 4 percent of Myanmar's population. This inner state has the best schools, hospitals and institutions of higher learning and provides a patrimonial structure of personal authority in which loyalty bestows status. In addition, a large proportion of military and business enterprises is controlled by

two giant corporations, the unions of Myanmar Economic Holding Limited and the Myanmar Economic Cooperations” (Turnell, 2011).

Kedua, dari aspek eksternal, dalam hal ini kekuatan oposisi tidak dalam posisi yang kuat untuk mendesak militer segera melaksanakan transisi politik. Metode represif yang dijalankan junta militer secara konsisten sejak kudeta hingga saat ini makin melemahkan kekuatan pro demokrasi. Hingga 25 November 2022, menurut laporan AAPP, 16.482 orang ditahan dan 2288 orang terbunuh akibat kekerasan militer (AAPP, 2022). Belum lagi eksekusi hukuman mati terhadap tahanan politik yang belum pernah terjadi pada rezim militer terdahulu. Mantan penasehat negara dan juga merupakan ikon demokrasi negara itu Aung San Suu Kyi ditangkap dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh pengadilan yang dikuasai junta militer. Dengan demikian Suu Kyi total dijatuhi 25 tahun penjara dengan tuduhan korupsi, memiliki *walkie talkie* ilegal, dan dakwaan lainnya (Chrisastuti, 2022). Hukuman ini tentu bertujuan untuk mematikan karir politik Suu Kyi mengingat usianya yang sudah memasuki 77 tahun dan meruntuhkan moral pendukungnya.

Peluang untuk melanjutkan transisi politik kemudian berada pada lingkungan eksternal. Artinya masyarakat internasional, baik itu Organisasi Internasional maupun negara harus terus mendesak dan memberikan tekanan baik itu melalui sanksi maupun mediasi dengan junta agar membuka diri dan berkomunikasi dengan dunia internasional. Tentu hal ini bukan perkara mudah mengingat junta militer memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan eksternal, apalagi secara ekonomi mereka tidak memiliki ketergantungan terhadap Barat. Butuh konsistensi dan kerjasama dari seluruh komunitas internasional untuk menekan junta.

Simpulan

Kudeta Militer yang dilakukan Jenderal Min Aung Hlaing 1 Februari 2021 lalu mengagetkan dunia internasional karena militer secara sepihak tidak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan NLD lalu kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintahan dari sipil. Kudeta tersebut bukan hanya langkah mundur dalam reformasi politik yang digulirkan di negara itu sejak 2010 lalu, namun ada kekhawatiran kembalinya otoritarianisme di negeri itu. Hal ini cukup beralasan mengingat pola kudeta mirip seperti yang dilakukan junta pada kudeta 1990. Ketika itu junta militer juga

menganulir hasil pemilu yang dimenangkan NLD pimpinan Aung San Suu Kyi dan kemudian melanjutkan kembali kekuasaan politiknya. Kudeta 1 Februari 2021 lalu juga disertai upaya sistematis melemahkan kekuatan demokrasi dan *civil society* yang sedang tumbuh di negeri itu.

Selain menggunakan metode represif untuk melawan rakyat yang menolak kudeta, junta juga melakukan serangkaian penangkapan dan penahanan terhadap ribuan aktivis politik. Aung San Suu Kyi yang menjadi ikon demokrasi di negara itu bahkan telah dipenjarakan dengan berbagai macam tuduhan. Sudah barang tentu kudeta ini menyebabkan krisis kemanusiaan mengingat banyaknya korban kekerasan yang ditimbulkan oleh junta militer. Setidaknya seperti yang telah disebutkan di atas kurang lebih 2288 orang tewas akibat kekerasan aparat sejak kudeta 2021 hingga November 2022.

Persoalan terbesar dalam proses reformasi politik di Myanmar itu adalah militer itu sendiri. Artinya reformasi politik yang bergulir sejak tahun 2010 itu tidak disertai dengan reformasi dalam tubuh militer. Militer sesungguhnya tidak ingin melepaskan diri dari politik sebagaimana lazimnya di negara demokratis. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan ada kursi 25% dalam parlemen dari unsur militer dan keikutsertaan partai politik bentukan militer dalam pemilu. Apalagi militer di negeri seribu pagoda ini dikenal solid dan kuat serta didukung pengendaliannya terhadap berbagai sumber daya di Myanmar. Hampir tidak terdengar ada perwira tinggi yang berseberangan pandangannya dengan pemimpin junta. Itulah sebabnya ketika pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlain meminta perpanjangan darurat militer dan otomatis memperpanjang kekuasaannya maka dengan mudah suara aklamasi persetujuan ia dapatkan dari dewan militer.

Apabila pesimisme terhadap kelanjutan demokrasi hadir dari ruang internal negara itu, maka peluang itu diharapkan muncul dari eksternal. Konsistensi dunia internasional untuk terus menekan junta militer tidak boleh kendor. Termasuk Indonesia. Sebagai negara yang berpengaruh di kawasan dan menduduki posisi ketua ASEAN 2023 Indonesia harus memainkan perannya dan berkontribusi terhadap penyelesaian krisis politik di Myanmar. Langkah pertama yang perlu dilakukan Indonesia adalah meminta junta untuk menghentikan segala bentuk kekerasan kepada sipil. Barulah setelah itu Indonesia membuka kembali ruang dialog kepada junta untuk memastikan transisi

politik di negara itu terus berlanjut. Indonesia harus meneruskan keterlibatannya dalam proses demokrasi di Myanmar yang sebenarnya telah dimulai sejak era SBY kemudian diteruskan pemerintahan Jokowi. Jabatan ketua ASEAN 2023 yang diamanahkan kepada Indonesia menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membawa kemajuan dalam penyelesaian krisis politik di Myanmar

Daftar Pustaka

- AAPP. (2022). *Assistance Association for Political Prisoners*. <https://aappb.org/>, diakses 26 November 2022
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Aziza, C. (2022). *Lima Negara Asean Kutuk Eksekusi Mati Aktivis Myanmar*. <https://elshinta.com/news/275308/2022/08/01/lima-negara-asean-kutuk-eksekusi-mati-aktivis-myanmar>, diakses 27 November 2022.
- Bakri, U. S. (2002). *Pedoman Penulisan Skripsi: Bidang Studi Hubungan Internasional*. Jayabaya University Press.
- Baylis et.al, J. (2008). *Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations* (Fourth Edi). Oxford University Press.
- Bonasir, R. (2021). *Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia diharapkan Membantu "Sahabat Lama"?* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076>, diakses pada 26 November 2022
- Chrisastuti, N. (2022). *Suu Kyi Divonis 6 Tahun Bui di Kasus Suap, Total Hukuman 26 Tahun*. <https://news.detik.com/internasional/d-6343290/suu-kyi-divonis-6-tahun-bui-di-kasus-suap-total-hukuman-26-tahun>, diakses 28 November 2022%0A%0A
- Dw.com. (2022). *No Title*. <https://www.dw.com/id/perang-saudara-mengintai-di-myanmar/a-57735015>, diakses 26 november 2022.
- Hardiantoro, A. (2022). *Indonesia Resmi Jadi ketua Asean 2023 , Apa Tugasnya*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/13/203100665/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-tugasnya-?page=all>, dipetik November 2022
- Hutapea, R. U. (2022). *No Title*. <https://news.detik.com/internasional/d-6209765/junta-myanmar-perpanjang-keadaan-darurat-6-bulan-lagi>, diakses 27 November 2022.
- Huntington, Samuel P, (2001), *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Pustaka Utama Grafiti.
- Lighton, C. (2010). *PBB Kecam Pemilu Burma*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101119_burmaelection. Diakses 24 November 2022.
- Mutiasari, K. A. (2022). *Serangan Jet Tempur Myanmar : Kronologi Hingga Jumlah Korban*. <https://news.detik.com/internasional/d-6370176/serangan-jet-tempur-di-myanmar-kronologi-hingga-jumlah-korban>, diakses 28 November 2022.
- Neher, C. D. (1995). *Democracy and Development in Southeast Asia*. Westview Press.
- Nugroho, Kris.(2001), "Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 2(23-24)
- O'Donnell , Guilerrmo, dan Schimetter, Philippe C.(1993) *Transisi Menuju Demokrasi*, LP3S.
- Pramudyani, Y. D. (2022). *Puluhan Tahanan Politik Terancam Dieksekusi oleh Militer Myanmar*. <https://babel.antarane.ws.com/berita/290657/puluhan-tahanan-politik->

- [terancam-dieksekusi-oleh-militer-myanmar](#), diakses 27 November 2022.
- Rebbighausen, R. (2021). *Kudeta Militer Menyatukan Etnis Minoritas*. <https://www.dw.com/id/kudeta-militer-menyatukan-etnis-minoritas-dan-gerakan-pro-demokrasi-di-myanmar/a-56710401>, diakses 26 November 2022.
- Renshaw, Catherine, (2019), "Myanmar's Transition without Justice", *Civil Society and Transitional in Asia and the Pasific*, Anu Press.
- Riza, A. (2021). *No Title*. <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/08/02/6-bulan-kudeta-myanmar-junta-janjikan-pemilu-sebut-akan-akhiri-darurat-militer-pada-agustus-2023>, diakses 20 November 2022.
- Roza, R. (2021). *Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi ASEAN*. Puslit Badan Keahlian DPR RI.
- Sundhaussen, U. (1995). Indonesia's New Order: A Model for Myanmar? *Asian Survey*, XXXV(8, August 1995).
- TBBC. (2007). *2007 Survey: Internal Displacement in Eastern Burma*. <http://www.tbbs.org>
- Tun, A. (2013). *No Title*. <https://thediplomat.com/2013/06/myanmars-look-west-policy-is-china-being-sidelined/>, diakses 25 November 2022.
- Turnell, S. (2011). "Myanmar's Fifty Years Authoritarian Trap." *Journal of International Affairs*, 65(1).
- Wahono. (2005). *Kebertahanan Pemerintah Junta Militer Myanmar Menghadapi Oposisi Tekanan Asing, Dan Gerakan-Gerakan Perlawanan*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Yasa, K. P. (2022). "Analisis Kudeta Militer Myanmar terhadap Pemerintahan Sipil ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Sui Generis*, 2(2).